



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran dan Rencana Kota yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomer 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran dan Rencana Kota perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Derah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- f. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retibusi Daerah Kepada Wajib Retibusi untuk diisi secara lengkap dan benar;

- g. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- h. Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada Badan Usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5000 m² atau lebih;
- i. Penggunaan Tanah adalah penggunaan tanah oleh badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5000 m² atau lebih dikaitkan dengan rencana Kota.
- j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi Yang Terutang;
- m. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- n. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kuarang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;

- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- t. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembyaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi pembayaran maupun sanksi administrasi;
- u. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;
- v. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKBT atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
- w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kepada orang pribadi atau badan atas ijin Penggunaan Tanah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan yang diberikan atas ijin peruntukan penggunaan tanah sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- a. Penelitian tentang kelayakan lahan terhadap ijin yang dimohon;
 - b. Penelitian terhadap kemanfaatan lahan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan pemanfaatan lahan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pemberian ijin atas penggunaan tanah sesuai rencana kota .

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan, jenis/klasifikasi usaha dan jangka waktu.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan ini yang terdiri biaya administrasi, pelayanan, pengawasan, pengadilan dan penegakan hukum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 1%o (satu permil) x NJOP PBB x Luas Penggunaan Tanah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terhutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah melunasi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 20

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan Retribusi yang tertuang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonanya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi dan atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.

Pasal 23

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDBLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini. Dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Menotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran dan Rencana Kota yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomer 7 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Semarang Nomer 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran dan Rencana kota dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KETUA**

ttd

H. SYAMSURI MASTUR, SH

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

ttd

SOETRISNO SUHARTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 1998
T E N T A N G
RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

I. PENJELASAN UMUM .

Sesuai dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruhnya ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi.

Berdasarkan hal diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomer 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran dan Rencana Kota sebagaimana telah diubah terahir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomer 7 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomer 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran dan Rencana

Kota perlu ditinjau dan diatur kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1997 dengan nama Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Yang Pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan pada :

- Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- Biaya variabel yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi.
- Volume pelayanan.
- NJOP PBB adalah Nilai Jual Obyak Pajak Bumi dan bangunan yang berlaku

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.
- Pasal 12 s/d 19 : cukup jelas.
- Pasal 20 : Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan pada kegiatan sosial dan keagamaan.
- Pasal 21 s/d 24 : cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi..
- Pasal 25 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 25 ayat (3) huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 26 s/d 30 : cukup jelas

===== @ @ @ =====



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 974.33 – 132**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, NOMOR 16
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG DAN
NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IJIN
MENDIRIKAN BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 7 Agustus 1998 Nomor 188.3/4554 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah yang disampaikan sudah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi daerah, sehingga perlu menetapkan pengesahannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG DAN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, Dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :**

- I. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :
1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.
 2. Konsideran mengingat :
 - nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
 - nomor urut 2 s/d 7, kata-kata Republik Indonesia", dihapus.
 - ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut :
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - nomor urut 9 lama diubah menjadi nomor urut 10 baru dan kata "Pelaksanaan" dihapus.
 - urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.
 3. Pasal 1 ditambahkan huruf w sebagai berikut :
 - w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis , lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 4. Judul BAB II diubah dan harus dibaca "NAMA", OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI"
 5. Pasal 2 dan Pasal 4, kata-kata "badan usaha" diubah dan harus dibaca "orang pribadi atau badan"
 6. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
 - (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan atas ijin peruntukan penggunaan tanah sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

7. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut :

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan, jenis/klasifikasi usaha dan jangka waktu.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan ijin yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

8. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca :

**”BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP”**

9. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru dan ayat (1), kata ”Besarnya” diubah dan harus dibaca ”Struktur besarnya”
10. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah

11. Pasal 7, dihapus

12. BAB V lama diubah menjadi BAB VIII baru dan harus dibaca :

**"BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN"**

13. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (2) dihapus.

14. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan harus dibaca :

**"BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG"**

15. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 13 baru dan harus dibaca :

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

16. Pasal 12 lama, dihapus.

17. BAB VII, Pasal 13 lama, dihapus.

18. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca :

**"BAB X
SANKSI ADMINISTRASI"**

19. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

20. Pasal 15 lama, dihapus.

21. BAB XI, Pasal 21 dan Pasal 22, dihapus.

22. BAB XIV dan Pasal 25, dihapus.

23. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

24. Pasal 31 :

- ayat (1) dan kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.

- Ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

25. Bagian penutup, kata-kata "Ditetapkan di S e m a r a n g" dan "Pada tanggal 15 Juli 1998" diubah dan harus ditulis :

"Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 1998"

26. Urutan BAB, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

II. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :

1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.

2. Konsideran mengingat :

- nomor urut 1 s/d 7, kata-kata Republik Indonesia, dihapus.
- Nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"

- ditambahkan nomor urut 8 dan 9 baru sebagai berikut :
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - nomor urut 8 lama diubah menjadi nomor urut 10 baru dan kata "Pelaksanaan" dihapus.
 - Urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.
3. Pasal 1 ditambahkan huruf w sebagai berikut :
- w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
4. Judul BAB II diubah dan harus dibaca "NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI".
5. Pasal 3 ayat (3), dihapus.
6. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut :

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Ijin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan gangguan serta jenis usaha.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk menutupi biaya peyelenggaraan izin yang terdiri biaya administrasi, biaya survey lapangan, pengawasan dan pengendalian.

7. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca:

” BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF’

8. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru, dan ayat (1), kata ”Besarnya” diubah dan harus dibaca ”Struktur besarnya”.
9. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

10. Pasal 7, dihapus.
11. BAB V lama diubah menjadi BAB VIII baru dan harus dibaca:

”BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN”

12. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (2) dihapus.
13. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan harus dibaca :

**"BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG"**

14. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 13 baru dan harus dibaca :

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII, Pasal 13 lama, dihapus.
17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca.

**"BAB X
SANKSI ADMINISTRASI"**

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

19. Pasal 15 lama, dihapus.
20. BAB XI, Pasal 21 dan Pasal 22, dihapus.
21. BAB XIV dan Pasal 25, dihapus.
22. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

23. Pasal 31 :

- ayat (1) dan kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.
- ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :
 - (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

24. Bagian penutup, kata-kata "Ditetapkan di S e m a r a n g" dan "Pada tanggal 15 Juli 1998" diubah dan harus ditulis :

"Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 1998"

25. Urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

III. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :

1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.
2. Konsideran Mengingat :
 - nomor urut 1 s/d 7, kata-kata "Republik Indonesia", dihapus.
 - Nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
 - ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut :
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - nomor urut 9 lama diubah menjadi nomor urut 10 baru dan kata "Pelaksanaan" dihapus.
 - Urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.

3. Pasal 1 ditambahkan huruf w sebagai berikut :
 - w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
4. Judul BAB II diubah dan harus dibaca ” NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI”
5. Pasal 3 ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :
 - (3) Dikecualikan Obyek Retribusi adalah Bangunan Milik Pemerintah Daerah.
6. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut :

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk menutupi biaya peyelenggaraan administrasi, survey lapangan, dan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian waktu pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian penggunaan serta kondisi bangunan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, pencetakan peta, penataan perpetaan, perencanaan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) dan koefisien ketinggian bangunan (KTB) dan biaya pembinaan.

7. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca :

”BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP”

8. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru, ayat (1) kata ”Besarnya” diubah dan harus dibaca ”Struktur besarnya”
9. Pasal 6 lama diubah menjadi Pasal 9 baru.
- ayat (1), dihapus.
 - Ayat (2) diubah menjadi ayat (1) dan harus dibaca :
 - (1) Bangunan pemerintah selain bangunan Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya yang ditetapkan.
 - Ayat (3) dan (4) diubah menjadi ayat (2) dan (3)
10. BAB IV dan Pasal 7 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 10 baru dan harus dibaca :

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

11. Pasal 8, dihapus.
12. BAB V lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca :

**"BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN"**

13. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru.
14. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 12 baru dan ayat (2) dihapus.
15. BAB VI lama diubah menjadi BAB VII baru dan harus dibaca :

**"BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG"**

16. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 13 baru dan harus dibaca :

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

17. Pasal 13 lama, BAB VIII dan Pasal 14 lama, dihapus.
18. BAB VIII diubah menjadi BAB IX baru dan harus dibaca :

**"BAB X
SANKSI ADMINISTRASI"**

19. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

20. Pasal 16 lama , dihapus.
21. BAB X, Pasal 22 dan Pasal 23, dihapus.
22. BAB XIII dan Pasal 26, dihapus.

23. Pasal 31 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
24. Pasal 32 :
- ayat (1) dan kata-kata ”sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” dihapus.
- ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
25. Pasal 35, kata ”penempatan” diubah dan harus dibaca ”penempatannya”
26. Bagian penutup, kata-kata ”Ditetapkan di S e m a r a n g” dan ”Pada tanggal 15 Juli 1998” diubah dan harus ditulis :
- ”Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 1998”
27. Urutan Bab, pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 1999
MENTERI DALAM NEGERI
ttd
SYARWAN HAMID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah di Semarang;
7. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang.